JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

ADHAPER

Vol. 5, No. 1, Januari – Juni 2019

- **Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah**

Dhian Indah Astanti, B. Rini Heryanti, Subaidah Ratna Juita

ISSN. 2442-9090

ADHAPER

DAFTAR ISI

1. Simplifikasi Prosedur Beracara dengan Pemanfaatan Teknologi dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Faisal Luqman Hakim	1
2. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Ganti Rugi Immateriil pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Analisis Putusan Kasasi No. 3215 K/PDT/2001) Rai Mantili, Anita Afriana	19
3. Buah Simalakama Pengaturan Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap Penyelesaian Kepailitan Ekonomi Syariah di Indonesia Sufiarina	41
4. Tuntutan atas Hak Sangkal Pemberi Kuasa Kepada Penerima Kuasa dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Antara Ancaman dan Pengejawantahan Hak Imunitas Profesi Advokat) Heri Hartanto	59
5. Pengaturan Pengajuan Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyelesaian Sengketa Asuransi di Indonesia Wetria Fauzi	75
6. Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Teuku Yudi Afrizal	93
7. Hubungan Kemitraan dalam Sengketa Terkait Ketenagakerjaan Rangga Sujud Widigda dan Aisyah Sharifa	113
8. Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Hakim Perdata dalam Menilai Kompetensinya Secara Otonom Damian Agata Yuvens dan Rianty Hutabarat	133
9. Penyelesaian Sengketa Hak atas Logo (Suatu Kajian <i>Overlapping</i> Hak Cipta dan Merek) Muchtar A H Labetubun	151
10. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dhian Indah Astanti, B. Rini Heryanti, Subaidah Ratna Juita	167

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

Dhian Indah Astanti, B. Rini Heryanti, Subaidah Ratna Juita

dhian.indah.astanti@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang

ABSTRAK

Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain berupa prinsip bagi hasil. Melihat perkembangan bank syariah selama ini, prinsip syariah yang menjadi landasan utama bank syariah dalam menjalankan tugasnya belum dapat diterapkan dan ditegakkan secara optimal terutama dalam hal apabila terjadi sengketa antara para pihak, bank syariah dan nasabahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah serta prinsip penanganan penyelesaian sengketa perbankan syariah. Penelitian hukum yang digunakan yuridis sosiologis dengan analisis secara kualitatif dan diidentifikasi serta dilakukan kategorisasi. Kesimpulan bahwa lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sejak tanggal 30 Maret 2006 telah memberikan payung hukum bagi penerapan Ekonomi Syariah di Indonesia dan sengketa bidang perbankan syariah menjadi kewenangan lingkungan peradilan agama, penyelesaian sengketa terkait kegiatan ekonomi perbankan syariah diselesaikan dengan dua cara yaitu litigasi dan non litigasi disamping itu lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah lebih mempertegas mekanisme penyelesaian sengketa antara pihak bank dengan nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) bahwa penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.

Kata Kunci: *Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Agama, Perbankan Syariah*

ABSTRACT

The Principle of Islamic banking is part of Islamic teachings relating to economy. One of the principles in Islamic economics is the prohibition of usury in its various forms, and using the system, among others, in the form of profit sharing principles. Seeing the development of Islamic banks so far, sharia principles which become the underpinning of Islamic banks in carrying out their duties have not been able to be implemented and enforced optimally, especially when dispute emerges among parties, Islamic banks and their customers. This research aims to ascertain and comprehend the authority of Religious Court in resolving sharia banking disputes along with the principles of handling sharia banking dispute resolution. This study is sociological juridical legal research. Data are collected by conducting interview, distributing questionnaires, and doing literary review. The data which gathered in this research included primary data and secondary data, and then those data will be analyzed qualitatively, identified and categorized. Data which have been analyzed can be

concluded as the answer to the problems. With the issuance of Law Number 3 Year 2006 concerning the amendment of Law Number 7 of 1989 concerning religious Courts, since March, 30th 2006 it has provided a legal protection for the implementation of Sharia Economics in Indonesia and disputes in the Islamic banking sector have become the authority of the religious court environment, dispute resolution related to Islamic banking economic activities completed in two ways, litigation and non-litigation in addition to the issuance of Law Number 21 of 2008 concerning Islamic banking further reinforces the dispute resolution mechanism between the bank and the customer stipulated in Article 55 Section (1), (2), and (3) which states settlement is carried out in accordance with the contents of the contract.

Keywords: *Dispute Resolution, Islamic Banking, Religious Court*

LATAR BELAKANG

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat dan impresif. Rata-rata pertumbuhan asset perbankan syariah mencapai lebih dari 30 % pertahun. Dari aspek hukum, perkembangan perbankan syariah juga signifikan yang ditandai dengan lahirnya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut sebagai “UU Perbankan Syariah”).

Seperti halnya Bank Konvensional, Bank Syariah mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara finansial (*intermediary financial*), yang melakukan mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana secara seimbang, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.¹Oleh karena itu perkembangan dan pertumbuhan Perbankan Syariah memerlukan dukungan dari 4 (empat) aspek. Pertama, pemantapan aspek regulasi pemerintah dalam menopang laju pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia. Kedua, pengembangan aspek-aspek praktis institusi bisnis dan Keuangan Syariah. Ketiga, pengembangan keilmuan ekonomi Islam melalui riset-riset baik individual maupun institusional, seperti pengembangan Perguruan Tinggi Ekonomi Islam dan Pendidikan Tinggi Ekonomi Syariah. Keempat, percepatan pertumbuhan lembaga Ekonomi Syariah di Indonesia.

Disahkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 , mengakui keberadaan bank syariah di Indonesia yang menjalankan fungsi lembaga perantara keuangan sesuai prinsip syariah sebagai landasan operasional. Bank Syariah menurut Pasal 1 ayat 7 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari atau Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

¹ Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, UII: Press, Yogyakarta, h. 3

Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain berupa prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya.

Melihat perkembangan bank syariah selama ini, prinsip syariah yang menjadi landasan utama bank syariah dalam menjalankan tugasnya belum dapat diterapkan dan ditegakkan secara optimal² terutama dalam hal apabila terjadi sengketa antara para pihak, bank syariah dan nasabahnya.³

Perkembangan perbankan syariah yang begitu signifikan tentunya membawa konsekuensi kemungkinan akan terjadinya suatu masalah yang dapat menimbulkan sengketa dalam kegiatan transaksi perbankan. Sengketa muncul diakibatkan oleh berbagai alasan dan masalah, terutama karena adanya *conflict of interest* diantara para pihak. Kondisi ini tentu menimbulkan kebutuhan terhadap suatu aturan guna menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam konteks kegiatan transaksional perbankan syariah, sengketa antara nasabah dan bank selama ini lebih banyak diakibatkan oleh tiga hal:⁴

1. Adanya perbedaan penafsiran mengenai akad yang sudah disepakati
2. Adanya perselisihan ketika transaksi sudah berjalan
3. Adanya kerugian yang dialami salah satu pihak sehingga melakukan wanprestasi

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sejak tanggal 30 Maret 2006 telah memberikan payung hukum bagi penerapan Ekonomi Syariah di Indonesia dan sengketa bidang perbankan syariah menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama, sengketa bidang perbankan syariah menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. Hibah, e. wakaf, f. Zakat, g. Infak, h. Sedekah, dan i. Ekonomi Syariah.

² Cak Basir, 2012, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di PA dan Mahkamah Syariah*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, h.5.

³ *Ibid*, h. 6.

⁴ Khopiatuziadah, "Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah" 2013. Vol. 10-No. 3, *Jurnal Legislasi Indonesia*, h. 279.

Menurut penjelasan Pasal 49 huruf I Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang dimaksud undang-undang dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi bank syariah, sehingga dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan salah satu bidang ekonomi syariah yang termasuk dalam kewenangan absolute lingkungan Peradilan Agama.

Lahirnya Undang-undang No.21 Tahun 2008 lebih mempertegas mekanisme penyelesaian sengketa antara pihak bank dengan nasabah. cara penyelesaian sengketa perbankan syariah telah diatur dalam Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 sebagai berikut:

ayat (1)

“penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”.

ayat (2)

“dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad”.

ayat (3)

“penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah”.

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) menyebutkan yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. Musyawarah,
- b. Mediasi perbankan,
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan atau
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 tersebut maka penyelesaian sengketa terkait kegiatan ekonomi perbankan syariah diselesaikan dengan dua cara, yaitu melalui cara litigasi dan cara non litigasi. Adanya pilihan forum (*choice of forum*) yang dimungkinkan untuk penyelesaian sengketa dalam Pasal 55 ayat (2), dan (3) Undang-undang No.21 Tahun 2008.

Dengan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan ekonomi syariah, maka peluang terjadinya sengketa, konflik antara pelaku ekonomi syariah juga semakin besar. Suatu sengketa bermula dari perselisihan paham yang kemudian berlarut-larut tidak terselesaikan antara para

subjek hukum yang sebelumnya telah mengadakan hubungan hukum perjanjian, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban yang ditimbulkannya berjalan tidak harmonis⁵.

Penyelesaian sengketa ekonomi secara litigasi di pengadilan merupakan tindakan *ultimum remedium* melalui lingkungan peradilan yang berwenang. *Ultimum Remedium* berupa tindakan terakhir yang dapat ditempuh apabila tidak diperoleh upaya penyelesaian secara kekeluargaan.

Bertolak dari hal tersebut jelas cakupannya sangat luas, guna mencegah luasnya cakupan tersebut, dan untuk memudahkan pembahasan maka permasalahan dalam penelitian ini mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah serta prinsip penanganan penyelesaian sengketa perbankan syariah

Adapun metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah jenis atau tipe penelitian hukum non doktrinal/yuridis sosiologis. Pendekatan ini dipilih mengingat dalam rangka mencapai tujuan penelitian tidak hanya berpijak pada ketentuan hukum saja namun terdapat faktor-faktor sosiologis yang perlu juga mendapat perhatian seperti fenomena sosial yang terkait dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta .

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo Kab. Sukoharjo dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Kabupaten Sleman). Di samping itu pemilihan lokasi penelitian sebagai sampel didasarkan atas metode penentuan purposive sampling yaitu pemilihan sampel atas tujuan pertimbangan tertentu yaitu di kedua wilayah itu.

PEMBAHASAN

Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Lahirnya Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 21 Maret 2006 yang dikenal dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (UU Peradilan Agama) telah meletakkan amanah dan tanggung jawab yang baru di lingkungan Peradilan Agama.

Peradilan agama merupakan salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan. Peradilan agama diberi kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu

⁵ Cik Basir, 2010, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta. h. 5.

antara orang-orang yang beragama islam. Kewenangan Peradilan Agama ini diperluas termasuk bidang ekonomi syariah..

Berdasarkan Pasal 49 huruf I UU Peradilan Agama, kewenangan peradilan agama diperluas dari sebelumnya. Apabila sebelumnya (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), kewenangan Peradilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah, maka sekarang berdasarkan Pasal 49 huruf i tersebut, kewenangan Peradilan Agama diperluas termasuk zakat, infak dan ekonomi syariah.

Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Pasal 49 huruf (i) UU No 3 Tahun 2006 yang dinyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah. penjelasan huruf (i) pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah (akad syariah), yang meliputi: a. bank syariah; b. lembaga keuangan makro syariah; c. asuransi syariah; d. reasuransi syariah; e. reksadana syariah; f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; g. sekuritas syariah; h. pembiayaan syariah; i. pegadaian syariah; j. dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan k. bisnis syariah.

Dari penjelasan pasal tersebut dapat diketahui bahwa jangkauan kewenangan pengadilan lingkungan peradilan agama dalam bidang ekonomi syariah sudah meliputi keseluruhan bidang ekonomi syariah. Hal ini dapat dipahami dari maksud kata ekonomi syariah itu sendiri yang dalam penjelasan pasal tersebut siartikan sebagai perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.

Lebih lanjut penjelasan Pasal 49 ini menyebutkan bahwa orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah, atau bank konvensional yang membuka unit usaha syariah) seperti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan lain-lain) yang menggunakan akad berprinsip syariah dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam pelaksanaan akad maupun dalam penyelesaian perselisihan.

Sedangkan menurut Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, dapat diselesaikan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan

Agama. Namun demikian, ada kemungkinan penyelesaian sengketa melalui kesepakatan para pihak yang tertulis di dalam kontrak (akad). Lebih lanjut di dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan pula bahwa “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya penyelesaian sengketa melalui non litigasi seperti musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau lembaga arbitrase lain; dan/atau melalui litigasi seperti penyelesaian sengketa melalui pengadilan dalam lingkungan agama yang berada di bawah peradilan umum.

Pada transaksi keuangan antara pihak bank syariah dengan nasabahnya, dalam hal terjadi sengketa sebagian besar disebabkan karena adanya pembiayaan bermasalah atau *non performing finance* (NPF).⁶ Masalah lain juga bisa timbul karena pilihan *profit and loss sharing* atau *revenue sharing* pada akad penyertaan modal. Masalah ini timbul ketika penyaluran dananya kepada masyarakat pada akad mudharabah di mana bank tidak diperkenankan turut campur dalam kegiatan sehari-hari usaha pengelola (*mudharib*)

Sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya, karena sengketa pada hakekatnya merupakan aktualisasi dari suatu perbedaan dan/atau pertentangan antara dua pihak atau lebih.⁷ Penyelesaian sengketa merupakan atau termasuk dalam ruang lingkup hukum perjanjian, sehingga sifatnya adalah terbuka (*open system*). Azas yang berlaku pun adalah azas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Artinya para pihak bebas melakukan pilihan hukum atau menentukan tata cara dan prosedur, serta forum yang akan dipakai sebagai sarana menyelesaikan sengketa yang dihadapinya.⁸

Hukum formil yang Digunakan Dalam Proses Beracara di Peradilan Agama

Dalam UU Peradilan Agama, berkaitan dengan Hukum Acara/Tata Cara Pemeriksaan Sengketa Ekonomi Syariah yang digunakan oleh lingkungan Peradilan Agama tidak diatur secara khusus. Tidak dijumpai satu pasalpun yang mengatur Hukum Acara Sengketa perkara Ekonomi Syariah. Pengaturan mengenai Hukum Acara, hanya diatur secara umum sebagaimana termuat pada Bab IV bagian Pertama yaitu Pasal 54 UU Peradilan Agama yang berbunyi: “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi*, UII Press, Yogyakarta, h. 215.

⁷ Bambang Sutyoso, 2006, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solusi dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, Citra Media, Yogyakarta, h. 3.

⁸ Azas Kebebasan Berkontrak ini dilandasi Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian (kontrak/akad) yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan hal tersebut, maka proses pemeriksaan gugatan sengketa syariah mulai dari pengajuan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan putusan, semua tunduk kepada hukum acara yang berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum, sebagaimana diatur dalam *Het Herziencie Indonesie Reglement* (HIR) untuk Jawa dan Madura, dan *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (RBg) untuk daerah luar Jawa dan Madura.

Eksekusi Putusan Peradilan Agama

Berkaitan dengan eksekusi putusan pengadilan yang terkandung dalam putusan pengadilan tersebut bentuk putusan maka mempunyai kekuatan eksekutorial dengan sendirinya. Apabila dalam putusan tercantum amar yang bersifat *condemnatoir* (menghukum atau mengharuskan melakukan atau tidak melakukan sesuatu), maka putusan tersebut melekat kekuatan eksekutorial. Jika pihak yang kalah tidak mau mentaati putusan secara sukarela putusan dapat dijalankan dengan paksa berdasarkan ketentuan Pasal 195 HIR atau Pasal 206 RBg.⁹ Dalam hal ini putusannya mengandung putusan *condemnatoir*; maka, maka pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap putusan tersebut, dengan demikian, sejak lahirnya undang-undang tahun 1989, peradilan agama tidak boleh melakukan eksekusi sendiri.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama diberi kewenangan untuk mengadili sengketa ekonomi syariah, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan pula dalam melaksanakan eksekusi terhadap barang jaminan yang diagunkan pada bank syariah, karena pada dasarnya perjanjian jaminan adalah perjanjian yang bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokok. Apabila dalam suatu jenis pembiayaan (*musyarakah, mudharabah, murabahah*) dibarengi dengan perjanjian jaminan, maka perjanjian jaminan tersebut melekat pula prinsip syariah, sehingga jika terjadi maka Pengadilan Agama berwenang menyelesaikannya, sepanjang perjanjian pokoknya dibuat berdasarkan prinsip syariah maka perjanjian tambahannya mengikuti perjanjian pokoknya sehingga Pengadilan Agama berwenang pula menyelesaikannya.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Agama mempunyai tugas untuk menyelesaikan setiap ada permohonan eksekusi baik eksekusi terhadap barang jaminan di perbankan syariah, yang diajukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Dasar Hukum Putusan Hakim dalam Perkara Penyelesaian Sengketa Syariah

⁹ Yahya Harahap, 2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 311.

¹⁰ Dadan Muttaqien dan Fakhruddin Cikman, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Ctk. 1, Total Media, Yogyakarta, h. 41.

Hakim merupakan penentu suatu keputusan perkara yang telah disengketakan oleh para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, putusan dari hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah yurisprudensi bila diikuti oleh para hakim lain dalam memutus suatu perkara yang sama. Apabila suatu perkara yang diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi sebuah yurisprudensi, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa sebagaimana yang dicantumkan dalam setiap putusan hakim.

Putusan pengadilan adalah suatu keputusan ketetapan hukum yang diucapkan oleh hakim dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum melalui proses dan procedural hukum acara perdata serta memiliki kekuatan hukum yang sah. Putusan dijatuhkan secara obyektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain. Putusan juga harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis, dimana argumentasi tersebut harus diawasi dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin sifat keterbukaan dan kepastian hukum dalam proses peradilan.

Dalam masalah perdata (seperti kasus sengketa perbankan syariah), seorang hakim harus memilih salah satu dari tiga jenis putusan akhir yang dikenal dalam hukum acara perdata, tiga putusan tersebut, yaitu:

- 1). Putusan *Declaratoir* (*declaratory vonnis, declaratory judgement*), putusan yang sifatnya hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata.
- 2). Putusan *Constitutif*, putusan yang sifatnya meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang Baru, misalnya putusan yang menyatakan seseorang jatuh pailit.
- 3). Putusan *Condemnatoir*, putusan yang berisi penghukuman, misalnya pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya untuk membayar hutangnya.

Hakim dalam setiap keputusannya harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi tuntutan (PETITUM) serta dasar atau alasan-alasan daripada sebuah tuntutan/*middelen van den eis* (*posita*) dan mengabaikan gugatan selebihnya. Hakim tidak boleh memutus perkara yang melebihi apa yang diminta oleh penggugat, atau dengan kata lain hakim tidak boleh hanya memeriksa sebagian saja dari tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Sedangkan dalam menjatuhkan putusan hakim haruslah memberikan gambaran:

1. Kepada para pihak yang berkepentingan telah diberikan kesempatan sepenuhnya untuk memberikan pendapat atau argumentasi masing-masing dalam membela kepentingannya

dan memberikan bukti sepenuhnya guna memperkuat argumentasinya di depan pengadilan;

2. Seorang hakim harus memiliki kuat tidaknya suatu alat bukti dan harus mempunyai keyakinan akan tindak pidana yang dilakukan si terdakwa;
3. Dalam mempertimbangkan putusan suatu perkara, hakim tidak memiliki hak yang bebas, artinya hakim juga patuh pada undang-undang;
4. Hakim harus memberikan gambaran bahwa pertimbangan putusan dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab serta kejujuran yang tinggi berdasarkan undang-undang.¹¹

Untuk menjatuhkan putusan, hendaklah hakim mempertimbangkan, mengetahui dan memahami segala hal yang terjadi, meneliti bukti-bukti serta fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak saja menjadi syarat suatu putusan sebagaimana ketentuan undang-undang, tetapi juga untuk memberikan dasar keyakinan dan alasan di dalam menjatuhkan putusan.

Aspek Hukum Penerapan Prinsip Syariah Dalam Kontrak Pembiayaan di Perbankan Syariah Indonesia

Istilah kontrak sering disebut akad atau perjanjian, yaitu bertemunya ijab yang diberikan oleh salah satu pihak dengan *qabul* yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syari'i dan menimbulkan akibat hukum, yaitu timbulnya hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain. Dari pengertian tersebut maka dalam sebuah kontrak di perbankan syariah, pembuatan kontrak merupakan kunci utama. Tanpa adanya akad, maka transaksinya diragukan dan dapat menimbulkan persengketaan pada suatu saat.

Kontrak pembiayaan mengandung arti kontrak yang dibuat secara baku, yang mana salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada formulir kontrak yang sudah ada kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan kesempatan bernegosiasi yang terbatas. Keabsahan kontrak tersebut ditentukan melalui apakah klausul-klausul yang tertera dalam kontrak syariah tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak.¹²

Sistem perbankan yang mendasarkan pada syariah dengan penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah baik melalui penghimpunan dana maupun penyaluran dana, dikaji dari aspek hukum privat merupakan hubungan hukum bank dengan nasabah yang didahului adanya suatu kontrak (*contractual agreement*) atau akad antara investor pemilik dana (*sahib al-mal*) dengan investor pengelola dana (*mudharib*) yang bekerjasama untuk melakukan usaha yang produktif dan berbagi keuntungan secara adil (*mutual investment relationship*).

¹¹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II (April, 1994), h. 192-194.

¹² Alamsyah, Hakim Pengadilan Agama Sengeti, "Klausula Eksepsi Dalam Kontrak Baku Syariah", dalam www.badilag.net, akses 21 Februari 2013.

Oleh karenanya, islam dengan tegas dan jelas mendorong sepenuhnya setiap subyek hukum yang terdiri dari individu maupun badan hukum ketika mengadakan berbagai kontrak agar hati-hati dan senantiasa memperhatikan rukun dan syarat sahnya akad sebagaimana yang ditentukan dalam hukum islam.

Dalam transaksi pembiayaan bisnis syariah, pembuatan kontrak merupakan kunci utama, tanpa adanya akad maka transaksinya diragukan, karena dapat menimbulkan persengketaan pada suatu saat. Isgan tegas dan jelas mendorong sepenuhnya warga masyarakat dan terutama penganutnya agar hati-hati dan mesti membuat akad dari setiap transaksi yang mereka laksanakan antara sesama manusia.

Setiap transaksi pembiayaan di bank syariah membutuhkan sebuah kontrak. Kontrak tersebut terjadi di awal. Dalam membuat kontrak pembiayaan, bank syariah masih banyak mengacu pada format perjanjian kredit di bank konvensional. Namun dilakukan juga penyesuaian dalam pasal-pasal nya agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Penyesuaian yang dilakukan berpedoman pada hukum islam yang berlaku, dan setelah itu juga mengacu kepada ketentuan Hukum Positif Indonesia. Hukum Indonesia yang patut diperhatikan juga dalam pembuatan Perjanjian (Akad) ini antara lain Undang-undang tentang Perbankan Syariah, Undang-undang Perseroan Terbatas, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), dan lain sebagainya.

Efektivitas Penerapan Prinsip Syariah dalam Penyusunan Kontrak Bisnis Syariah

Efektivitas penerapan prinsip syariah dalam kontrak bisnis syariah tercermin dari pemilik modal dan pengelola modal itu sendiri. Efektivitas pembiayaan dari sisi pengelola modal (nasabah) berdasarkan beberapa parameter, yaitu:

- a. Prosedur pembiayaan yang menunjukkan kemudahan bagi calon nasabah untuk memahaminya;
- b. Persyaratan pembiayaan yang menunjukkan kesanggupan/kemudahan bagi calon nasabah pembiayaan untuk memenuhinya, termasuk ada atau tidak adanya jaminan;
- c. Waktu pencairan atau realisasi yang menunjukkan kecepatan bank syariah untuk mewujudkan pembiayaan yang diajukan;
- d. Lokasi bank yang menunjukkan kemudahan bagi nasabah untuk mengakses sumber permodalan yang disediakan;
- e. Dampak pembiayaan yang menunjukkan tingkat kemantapan pembiayaan.

Jika dilihat dari sisi pengelolaan modal, efektivitas pembiayaan bagi hasil dengan prinsip mudharabah dan musyarakah adalah dapat diukur melalui penyaluran dana. Hal ini terkait dengan sejauh mana pihak pemilik modal menyalurkan pembiayaan dengan sistem syariah,

artinya semakin banyak dana yang disalurkan, maka pembiayaan sistem syariah tersebut semakin efektif.

Efektifitas penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kontrak bisnis di perbankan syariah dapat pula diukur dengan cara melihat kemandirian prosedur pembiayaan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Jumlah nasabah yang menunjukkan bahwa sistem pembiayaan dapat diterima dan mampu menjangkau secara luas;
- b. Keragaman mata pencaharian nasabah yang menunjukkan fleksibilitas prosedur pembiayaan yang dijalankan;
- c. Frekuensi pinjaman nasabah, sebagai tingkat keseringan nasabah mengambil pembiayaan;
- d. Frekuensi tunggakan, sebagai tingkat keseringan nasabah dalam menunggak pembayaran dalam suatu proses peminjaman;
- e. Pelayanan pembiayaan, sejauh mana tingkat pelayanan yang dilakukan mulai dari pengajuan pembiayaan sampai realisasi pembiayaan.

Pada pelaksanaan pembiayaan murabahah di bank syariah tidak seluruhnya (murni) berdasarkan prinsip-prinsip islam yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang syariah, yaitu: Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Namun juga masih berdasarkan hukum positif lainnya. Oleh karenanya, pelaksanaan pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah ini tidak selamanya berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan dan dietujui dalam kontrak yang telah disepakati oleh para pihak. Terdapat resiko dan kekhawatiran dari pihak pemilik modal pada pembiayaan murabah ini, salah satu yang dikhawatirkan tersebut adalah bagaimana apabila pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak lancar, dan menjadi pembiayaan yang bermasalah yang menjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Sehingga diperlukan adanya langkah-langkah khusus yang dilakukan bank untuk menyelematkan dana pembiayaan dan langkah-langkah dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan bermasalah antara bank dengan nasabah guna mencegah resiko dalam pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh nasabah. karena dana yang ada pada bank tidak hanya berasal dari dana pemilik modal saja, tetapi juga dana dari para nasabah yang menitipkan uangnya kepada bank. Maka sudah sepantasnya bagi bank untuk menjaga dan mempertanggungjawabkan kepercayaan dari nasabah tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Undang-undang tentang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 telah memberikan kompetensi atau kewenangan kepada pengadilan di lingkungan peradilan umum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah telah mereduksi kompetensi absolut peradilan agama, dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sangat jelas disebutkan bahwa peradilan agama mempunyai kompetensi absolut di bidang ekonomi syariah, termasuk di dalamnya mengenai bank syariah.

Salah satu ketentuan yang diatur dalam UU No 21 Tahun 2008 adalah Pasal 55 Ayat (1) yang mengatur tentang tempat penyelesaian sengketa perbankan syariah. Pasal itu menyebutkan “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”. Namun, ketentuan ayat (2) dan ayat (3) pasal tersebut membuka peluang penyelesaian sengketa di tempat lain. Syaratnya tempat penyelesaiannya telah diperjanjikan oleh para pihak sebelumnya dalam akad.

Dengan kehadiran undang-undang Perbankan Syariah kompetensi pengadilan dalam menangani persolan sengketa perbankan syariah bukan hanya menjadi kewenangan pengadilan agama, akan tetapi pengadilan umumpun mempunyai kewenangan yang sama untuk menangani perkara sengketa perbankan syariah.

Saran

Perlu ada kontribusi berbagai pihak dalam mencermati dan mengkaji ulang Undang-undang Perbankan Syariah terkait kompetensi lembaga litigasi dalam sengketa perbankan syariah. Sehingga amanat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang member kewenangan penuh terhadap pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi islam termasuk perbankan syariah dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya.

DAFTAR BACAAN

Anshori, Abdul Ghofur .*Hukum Perbankan Syariah*. Bandung: Refika Aditama

-----, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi*. Yogyakarta: UII Press, 2010

Basir., *Cak Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di PA dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012

Dewi, Gemala .*Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media

Firdaus, Muh dkk. *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2005

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II*
Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002

Sutedi, Adrian .*Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014

Sutiyoso, Bambang. *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solusi dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.

Sudarsono, Heri .*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Diskripsi dan Ilustrasi, Cet.1*. Yogyakarta: Ekonisia-FE UII

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (UI: Press, 1986

Soekanto Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Syahdaeni, Sutan Remi .*Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999

Zuhri, M. *Riba dalam Al Quran dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995

Jurnal

Khopiatuziadah, “*Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*” 2013. Vol. 10-No. 3, *Jurnal Legislasi Indonesia*